

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berawal dari konflik yang terjadi di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dibantu Bakorwil Pamekasan berupaya untuk melakukan rekonsiliasi konflik, dengan cara melayangkan surat kepada Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian tentang peluang pembentukan kelembagaan kawasan Konservasi Kepulauan di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur. Gagasan untuk membentuk kelembagaan kawasan konservasi ini disarankan oleh Kepala UPT Konservasi Pulau Karimun Jawa saat rombongan Bakorwil Pamekasan melakukan studi banding. Studi banding ini dilakukan dikarenakan sebelumnya Karimun Jawa juga mengalami konflik horizontal antar nelayan dan baru terselesaikan sejak Karimun Jawa dijadikan pulau konservasi.

Konflik inilah yang sering terjadi di Kepulauan Masalembu, seperti yang terjadi pada tahun 2014 ketika nelayan-nelayan Masalembu Madura menangkap para nelayan dari Lamongan sebanyak 100 nelayan yang menangkap ikan menggunakan kapal porsen yang menyebabkan rusaknya rumpon milik nelayan tradisional Kepulauan Masalembu Madura (RRI.co.id; 2/10/2014). Hal ini terjadi dikarenakan Kepulauan Masalembu merupakan daerah yang menjadi singgahan para nelayan dari wilayah luar. Dikarenakan Kepulauan Masalembu merupakan wilayah Segitiga Bermuda yaitu Segitiga Masalembu. Segitiga Masalembu sendiri terletak di antara Pulau Bawean - Kota Majene - Kepulauan Tengah, di sana kadang terjadi arus laut dan angin yang mengalir akibat adanya perbedaan tekanan dalam siklus harian ataupun tahunan (monsoon) lalu keduanya bertemu menjadi satu mirip layaknya tornado, badai, hurricane ataupun typhoon namun dalam putaran yang lambat tapi tiba-tiba berpindah arah. Daerah Segitiga Masalembu ini mulai dikenal sejak pertama kali memakan korban dan menenggelamkan kapal KM Tampomas II pada tanggal 27 Januari 1981. Selain itu, di Kepulauan Masalembu pernah terjadi kasus perompakan kapal luar Madura yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Kepulauan Madura sejak September 2014 sampai tahun 2015 (Berita

Joss, Seputar Jatim, 27 Maret 2015), dan bahkan ada kasus pemerasan yang dilakukan nelayan-nelayan Kepulauan Masalembu terhadap nelayan-nelayan Jawa Tengah dan Jakarta dengan cara meminta uang tebusan supaya kapalnya tidak dibakar, mulai dari Rp. 150 juta sampai Rp. 750 juta (DetikNews, 27 Maret 2015).

Oleh karenanya, aktivitas penangkapan ikan di berbagai wilayah tertentu kadangkala mengindikasikan akan adanya daerah yang padat nelayannya dengan sumber daya lautnya yang terbatas, seperti di pantai utara Jawa. Sehingga daerah tersebut dikategorikan sebagai wilayah penangkapan ikan yang melebihi potensi (overfishing), yang menurut datanya mencapai kurang lebih 130 persen. Sedangkan di wilayah pantai selatan Jawa tingkat penangkapan ikan masih di bawah potensi yang sebenarnya (underfishing), yakni lebih dari 41 persen (Kompas, 31 Januari 2004). Melalui data ini menunjukkan adanya ketimpangan penyebaran wilayah penangkapan ikan oleh nelayan. Sehingga dengan terkonsentrasinya wilayah perburuan ikan di suatu tempat tertentu bisa menyebabkan ancaman terhadap kelestarian sumberdaya laut, yang pada akhirnya akan memicu lahirnya konflik horizontal di antara nelayan.

Kepulauan Masalembu termasuk pada wilayah Kepulauan Madura tepatnya Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Kepulauan Masalembu terdiri dari tiga Pulau dengan dua Pulau Berpenghuni yakni Pulau Masakambing dan Pulau Karamian. Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur berjarak sejauh 151 mil dari Pelabuhan Kalianget Sumenep. Di mana Kabupaten Sumenep merupakan wilayah administratif yang berada di ujung timur Pulau Madura. Letak geografisnya membentang pada posisi 113°32'54''-116°16'48'' Bujur Timur dan 4°55'-7°24' Lintang Selatan. Berdasarkan kondisi geografis wilayahnya, maka Kabupaten Sumenep dapat dikelompokkan atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan Kabupaten Sumenep meliputi 18 (*delapan belas*) Kecamatan dan luas wilayahnya 1.146,927065 KM² atau 54,79%, sedangkan wilayah kepulauannya sebanyak 9 (*sembilan*) Kecamatan dengan luas wilayah 946,530508 KM² atau 45,21%, yang yang meliputi 126 buah pulau, 48 pulau berpenghuni (38%) dan 78 pulau tidak berpenghuni (62%).

Luasnya wilayah Kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep pada akhirnya akan menciptakan ragam potensi konflik, dikarenakan belum optimalnya nelayan-nelayan Kepulauan Sumenep dalam menangkap ikan di perairan laut Madura. Perahu dan alat tangkapan yang sederhana dan tradisional merupakan salah satu penyebab belum optimalnya hasil tangkapan ikan nelayan Madura. Potensi dan belum optimalnya tangkapan tersebut pada akhirnya berdatanganlah nelayan-nelayan dari luar Madura untuk menangkap ikan di perairan laut Madura. Kapal dan alat tangkap yang lebih modern dan canggih pada akhirnya menyebabkan hasil tangkapan nelayan luar Madura lebih banyak ketimbang tangkapan ikan para nelayan tradisional Madura. Di sinilah potensi konflik horizontal antar nelayan akan semakin kuat. Dalam artian bahwa minimnya hasil tangkapan akan semakin menjerat nelayan Madura ke kemiskinan yang lebih parah.

Potensi konflik horizontal itu semakin kuat dengan ragam stereotype bagi masyarakat Madura yang menyebut mereka sebagai orang yang mudah marah, temperamental, berani, agresif, gigih, dan religious. Benar tidaknya stereotype tersebut, namun orang luar Madura sering memberikan kesan negative ke masyarakat Madura. Masyarakat luar Madura sering mengidentifikasi bahwa masyarakat Madura seringkali menggunakan kekerasan fisik dalam menyelesaikan berbagai masalahnya, termasuk dalam konflik horizontal antar nelayan. Kekerasan fisik terhadap lawan berupa pembunuhan merupakan akar kebudayaan yang cukup lama. Meskipun pembunuhan tersebut dilakukan untuk mempertahankan harga dirinya, terutama harga diri terkait perempuan, hal inilah yang disebut carok (Wiyata, 2002). Artinya apabila dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi di Kepulauan Madura atau melibatkan etnis Madura, maka akan tampak deretan panjang catatan konflik horizontal, terutama dalam kajian ini adalah konflik antar nelayan di Kepulauan Masalembu, karena melibatkan nelayan dari luar Madura sehingga menjadi isu Nasional.

Melalui ragam permasalahan tersebut peneliti merasa cukup tertarik untuk mengkajinya mengingat masyarakat Madura memiliki nilai-nilai kearifan lokal budaya Madura yang penuh dengan nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai

perdamainan. Dengan nilai-nilai tersebut dan kebijakan dari pemerintah untuk menghindari konflik horizontal yang semakin meluas maka peneliti mencoba mengkajinya melalui upaya pembentukan kelembagaan kawasan konservasi di Kepulauan Masalembu melalui nilai-nilai kearifan lokal budaya masyarakatnya.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga ragam potensi laut yang dimiliki Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur dan para nelayan-nelayan lokal, serta nelayan luar. Menurut Dinas Hidro Oceanografi TNI Angkatan Laut, Negara Republik Indonesia memiliki sebanyak 17.408 pulau, yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Aceh sebelah barat sampai Papua wilayah sebelah timur, dan sebelah selatan mulai dari Jawa sampai Nusa Tenggara Timur hingga mendekati gugusan Kepulauan Filipina di sebelah utara dengan total luas garis pantai sepanjang 80.791 kilometer. Oleh karenanya Indonesia dianggap sebagai Negara maritime, dengan luas kawasan sekitar 7,7 juta kilometer persegi terdiri atas 25% territorial daratan (1,9 juta km²) dan luas territorial wilayah laut terdiri dari 75% luasnya (5,8 juta km²) (Kompas, 31 Januari 2004).

Selain itu, dengan pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, tersebar sekitar 4,5 juta hektar ekosistem mangrove yang membentengi daratan dari gempuran ombak. Topografi dasar samudera pun tak kalah menarik. Segala rupa dasar laut bisa dijumpai di Indonesia, mulai dari paparan dangkal, palung laut, lereng landai dan curam hingga gunung api. Meski hening dan gersang, laut jeluk didiami beragam kehidupan, seperti ikan, teripang, cumi-cumi dan sebagainya. Kekayaan kehidupan laut Indonesia yang melimpah itu sekaligus menyimpan keanekaragaman sumber daya ikan. Di sisi lain, seiring dengan melimpahnya keanekaragaman hayati. Sehingga akan sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara selama ratusan tahun ke depan (Mulyana dan Dermawan, 2008: 16-17).

Dengan potensi daerah maritim tersebut, Indonesia diperkirakan memiliki kekayaan sumber daya laut yang terdiri dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies terumbu karang. Namun, ironisnya sektor kelautan Indonesia hanya memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) baru berkisar sekitar 2% (Kompas, 20 Maret 2003). Hal ini menunjukkan

bahwasanya kekayaan laut Indonesia belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Sehingga menarik minat nelayan luar atau Negara lain untuk melakukan pencurian ikan di laut Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi pangan dunia (FAO) tahun 2001, jumlah ikan yang ditangkap secara illegal di perairan Indonesia mencapai 1,5 juta ton/tahun. Lokasi konsentrasi penangkapan ikan secara illegal tidak hanya di tengah laut, namun juga 7 mil dari bibir pantai yang merupakan lokasi beroperasinya nelayan-nelayan tradisional (Sumintarsih, dkk, 2005: 1). Hal inilah yang menyebabkan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia membuat kebijakan untuk meledakkan kapal atau perahu-perahu nelayan Negara lain yang melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan (2002) dalam forum No. 47, 10 Maret menunjukkan bahwasanya potensi laut Indonesia diburu oleh sekitar 2,7 juta nelayan dengan beragam cara dan alat yang dipakainya, dan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah. Penangkapan ikan ini dilakukan baik yang ada di wilayah pantai, perairan, dan di batas zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

Potensi tersebut juga terdapat di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 47.922 km², yang merupakan provinsi terluas di antara enam provinsi di Pulau Jawa. Di dalam wilayah provinsi Jawa Timur terdapat 229 pulau dan disebut sebagai Sub Wilayah II. Jika dilihat dari perbatasan, sisi utaranya berbatasan dengan Laut Jawa, sisi selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sisi timur berbatasan dengan Selat Bali/Provinsi Bali, dan sisi barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Melalui ragam potensi tersebut dan untuk menghindari terjadinya konflik horizontal antar nelayan lokal dan nelayan luar maka peneliti menganggap pentingnya media rekonsiliasi konflik, yakni melalui pembentukan kelembagaan kawasan konservasi pada kawasan Kepulauan di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur sesuai dengan Permen Kelautan Dan Perikanan RI No. Per. 2/Men/2009.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan kami teliti adalah:

1. Bagaimana identifikasi potensi wilayah perairan laut kepulauan di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur?
2. Bagaimana pemetaan wilayah rawan konflik di perairan laut Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur?
3. Apakah kelembagaan social/masyarakat yang telah ada/eksis di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur?
4. Bagaimana regulasi pembentukan kelembagaan kawasan konservasi sesuai Permen Kelautan Dan Perikanan RI No. Per. 2/Men/2009?
5. Adakah peluang pembentukan kelembagaan konservasi kepulauan di wilayah perairan laut Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur?

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui identifikasi potensi wilayah perairan laut kepulauan di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
2. Ingin mengetahui pemetaan wilayah rawan konflik di perairan laut Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
3. Ingin mengetahui kelembagaan social/masyarakat yang telah ada/eksis di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
4. Ingin mengetahui regulasi pembentukan kelembagaan kawasan konservasi sesuai Permen Kelautan Dan Perikanan RI No. Per. 2/Men/2009
5. Ingin mengetahui peluang pembentukan kelembagaan konservasi kepulauan di wilayah perairan laut Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur

4. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teridentifikasinya potensi wilayah perairan laut kepulauan di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur

2. Tersajinya pemetaan wilayah rawan konflik di perairan laut Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
3. Tersajinya data kelembagaan social/masyarakat yang telah ada/eksis di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
4. Tergambarkannya regulasi pembentukan kelembagaan kawasan konservasi sesuai Permen Kelautan Dan Perikanan RI No. Per. 2/Men/2009
5. Terdapatnya gambaran peluang pembentukan kelembagaan konservasi kepulauan di wilayah perairan laut Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur

5. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup kegiatan penelitian ini adalah:

1. Kelembagaan sosial/masyarakat di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
2. Regulasi kelembagaan di Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur
3. Regulasi kelembagaan di Kawasan Konservasi Kepulauan Masalembu Sumenep Jawa Timur